I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara berkembang menyadari pentingnya melaksanakan pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial. Dengan kata lain, pembangunan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyatnya. Hal ini menjadi tanggung jawab bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia.

Pembangunan merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.

Perkembangan pembangunan nasional tidak terlepas dari akuntabilitas pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau disebut dengan *Good Governance* akan mendorong perkembangan teknologi dan ekonomi, di setiap Negara. Pemerintahan yang

baik merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Upaya pencapaian tujuan tersebut setiap pemerintahan harus dapat mengelola sumber daya dan perekonomian di Negara salah satunya adalah pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Secara konsepsi hakikat akuntabilitas dalam arti luas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan keterangan. Akuntabilitas juga merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah umtuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Abdul Halim, 2012: 20).

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pengabdian yang mengutamakan efisiensi dan keberhasilan bangsa dalam pembangunan, yang dimanifestasikan antara lain dalam perilaku bertanggungjawab kepada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan terbuka untuk masyarakat. Kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat terutama kebijakan dalam pelaksanaan program kegiatan infrastruktur pemerintah melibatkan Pemerintah Daerah, sebab kinerja dan pengelolaan keuangan daerah saat ini menduduki posisi penting dalam strategi pemberdayaan Pemerintah Daerah dan mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) tidak terlepas dari pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah terkandung beberapa asas penting meliputi desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui asas desentralisasi, otonomi daerah hadir untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sendiri urusan pemerintahan dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah (Djaenuri, 2005:48).

Pelaksanaan program pembangunan Pemerintah Daerah berdasarkan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagai perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Inti perubahan yang akan dilakukan antara lain mempertajam esensi dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyangkut penjabaran terhadap hak dan kewajiban daerah dalam mengelola kegiatan program secara akuntabel dalam rangka terwujudnya *good governance* (Prasojo, 2006: 41).

Menurut Sedarmayanti (2011: 33) bahwa tuntutan terhadap akuntabilitas terhadap suatu program pemerintah merupakan hal utama yang harus dilakukan pemerintah dalam mewujudkan tujuan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*), di mana terhadap akuntabilitas terhadap suatu program

pemerintah yang baik adalah kemampuan mengontrol pelaksanaan program pemerintah secara ekonomis, efisien, dan akuntabel.

Konsep penerapan akuntabilitas dalam program pemerintah dapat dilihat dari contoh dalam Pembangunan Tahap II Jembatan Way Sekampung Kresnowidodo-Negara Saka Kabupaten Pesawaran. Pembangunan Tahap II Jembatan Way Sekampung Kresnowidodo-Negara Saka Kabupaten Pesawaran pada dasarnya bertujuan untuk membuka terisolasinya daerah akibat infrastruktur lama sudah rusak dan hanya jembatan gantung yang sudah lama tidak diperhatikan oleh Pemerintah Daerah.

Perencanan pembangunan Tahap II Jembatan Way Sekampung Kresnowidodo-Negara Saka Kabupaten Pesawaran muncul dari usulan masyarkat yang ditampung dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesawaran, dan instansi terkait lainnya yang selanjutnya dibahas dalam rencana kerja SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesawaran dan diusulkan di DPRD. Upaya merealisasikan Pembangunan Tahap II Jembatan Way Sekampung Kresnowidodo-Negara Saka Kabupaten Pesawaran dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan memberikan penguatan kepada DPRD tentang pentingnya pembangunan jembatan tersebut sebagai salah satu cara mencapai tujuan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Kinerja dan laporan pembangunan sangat penting terutama dalam hal akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan daerah terhadap program pemerintah. Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah menganggarkan pembangunan tahap II jembatan Way Sekampung Kresnowidodo-Negara Saka Kabupaten Pesawaran senilai Rp. 8,64 miliar. Dinas Pekerjaan Umum sebagai penanggungjawab dalam pembangunan tersebut diberikan kepercayaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dalam pelaksanaan pembangunan tahap II jembatan Way Sekampung Kresnowidodo-Negara Saka berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.

Akuntabilitas dalam pembangunan tahap II Jembatan Way Sekampung Kresnowidodo-Negara Saka Kabupaten Pesawaran memiliki implikasi yang luas dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, hal ini karena bentuk akuntabilitas tersebut merupakan pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesawaran terhadap lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran. DPRD Kabupaten Pesawaran sebagai lembaga yang menerima dan membahas penyelenggaraan pembangunan tahap II Jembatan Way Sekampung Kresnowidodo-Negara Saka memiliki kewenangan dalam mengkaji setiap laporan pembangunan yang telah dilaksanakan.

Penerapan prinsip akuntabel oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesawaran yang dalam hal ini sebagai pengelola pembangunan tahap II Jembatan Way Sekampung Kresnowidodo-Negara Saka yang langsung bersinggungan dengan masyarakat berpedoman pada prinsip-prinsip *good*

governance antara lain akuntabilitas publik, hal ini berimplikasi pada kinerja aparatur pemerintah sehingga penyelenggaraan pembangunan tahap II Jembatan Way Sekampung Kresnowidodo-Negara Saka bersifat terbuka terhadap masyarakat.

Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum terhadap DPRD Kabupaten Pesawaran dalam pembangunan tahap II Jembatan Way Sekampung Kresnowidodo-Negara Saka merupakan bentuk penyelengaraan pemerintah yang bersih dan bertanggungjawab, selain itu masyarakat juga akan menilai maksimal atau tidaknya kinerja para aparatur pemerintah di Kabupaten Pesawaran. Pembangunan tahap II Jembatan Way Sekampung Kresnowidodo-Negara Saka menjadi sorotan publik karena menggunakan anggaran yang cukup besar. Selain itu publik juga melihat prosedur dan mekanisme kerja yang informatif, akomodatif, sehingga menjamin akuntabilitas publik.

Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian terkait dengan objek penelitian peneliti. Merujuk pada hasil kegiatan pra penelitian, peneliti menemukan informasi bahwa ada beberapa peneliti sebelumnya yang telah melakukan penelitian pada SKPD suatu Pemerintah Daerah dalam waktu Tahun 2012 dengan topik atau objek penelitian yang hampir relevan yakni pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang sebagaimana yang peneliti uraikan di bawah ini. Hasil-hasil penelitian itu peneliti jadikan sebagai rujukan untuk menambah referensi dan memperkaya analisis.

Beradasarkan penelitian sebelumnya pada penelitian Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya oleh Eka Winda Herlianty mengenai "Akuntabilitas Pembangunan *Fly Over* Angkatan 45 Kota Palembang (Studi Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang)". Penelitian ini, peneliti menggunakan indikator akuntabilitas kinerja. Indikator ini dirumuskan dengan menggunakan teori Abdul Hafiz Tanjung tentang akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.

Hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, Eka Winda Herlianty menemukan fakta bahwa, dalam problema yang terjadi pada Pembangunan *Fly Over* Angkatan 45 Kota Palembang Tahun 2012 Dinas Pekerjaan Umum kurang transparan dan akuntabel hal ini terbukti mengenai adanya *mark up* dana anggaran pembangunan setelah adanya audit laporan hasil kinerja dan penggunaan anggaran pembangunan *fly over* angkatan 45.

Upaya audit dilakukan ke isntansi Dinas Pekerjaan Umum guna mewujudkan laporan pembangunan dan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Lemahnya pengawasan yang bersifat *preventif* (pencegahan) telah disalahgunakan oleh oknum pejabat daerah atau pun pemegang proyek pembangunan untuk kepentingan pribadi. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pembangunan tersebut menunjukan tidak maksimalnya kemampuan yang akuntabel dan keterbukaan sebagai pengukuran, tujuan dan sasaran program pemerintah.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti sebelumnya adalah dalam penelitian yang dilakukan peneliti fokus penelitian

akuntabilitas pembangunan tahap II jembatan Way Sekampung Kresnowidodo-Negara Saka Kabupaten Pesawaran sedangkan pada peneliti sebelumnya fokus penelitian pada akuntabilitas dan transparansi dana pembangunan *Fly Over* Angkatan 45 Kota Palembang (Studi Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang), penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengacu pada teori Abdul Halim yang menitikberatkan pada akuntabilitas kinerja pemerintah, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan teori Abdul Hafiz Tanjung mengenai akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.

Konsep akuntabilitas dalam pembangunan tahap II Jembatan Way Sekampung Kresnowidodo-Negara Saka Kabupaten Pesawaran dan juga merujuk pada penelitian terdahulu mengenai akuntabilitas dan transparansi pembangunan *Fly Over* Angkatan 45 Kota Palembang maka pemerintah perlu mengkaji kembali pengawasan intern sebagai pilar akuntabilitas mengingat bahwa ruang lingkup pengawasan akuntabilitas sangat luas dan memiliki kompleksitas yang tinggi, serta mengingat kewenangan penyelenggaraan pembangunan sudah terfragmentasi, sehingga dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum terhadap DPRD Kabupaten Pesawaran dalam pembangunan tahap II Jembatan Way Sekampung Kresnowidodo-Negara Saka yang efisien dan efektif.

Program pembangunan daerah seperti pada pembangunan tahap II Jembatan Way Sekampung Kresnowidodo-Negara Saka Kabupaten Pesawaran dalam penelitian ini mendasari teori akuntabilitas akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan menurut Abdul Halim sehingga dalam penelitian ini

indikator akuntabilitas pembangunan tahap II Jembatan Way Sekampung Kresnowidodo-Negara Saka Kabupaten Pesawaran mencakup akuntabilitas perencanaan strategik, akuntabilitas pembangunan dan akuntabilitas pertanggungjawaban (evaluasi dan pelaporan).

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti memandang perlu mengkaji lebih lanjut berbagai masalah akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum terhadap DPRD Kabupaten Pesawaran dalam program pembangunan daerah, sehingga peneliti menganggap perlu diadakan penelitian mengenai "Akuntabilitas Pembangunan Tahap II Jembatan Way Sekampung Kresnowidodo-Negara Saka Kabupaten Pesawaran (Studi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesawaran)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas Pembangunan Tahap II Jembatan Way Sekampung Kresnowidodo-Negara Saka Kabupaten Pesawaran.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas Pembangunan Tahap II Jembatan Way Sekampung Kresnowidodo-Negara Saka Kabupaten Pesawaran.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi, menjadi bahan referensi dalam ilmu pemerintahan dan menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu tentang manajemen pemerintahan dalam akuntabilitas Pembangunan Tahap II Jembatan Way Sekampung Kresnowidodo-Negara Saka Kabupaten Pesawaran.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintahan Kabupaten Pesawaran khususnya Dinas Pekerjaan Umum dalam pengelolaan Pembangunan Tahap II Jembatan Way Sekampung Kresnowidodo-Negara Saka Kabupaten Pesawaran.